

# **RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**KABUPATEN PASAMAN BARAT**

## KATA PENGANTAR

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka sebagai rangkaian dokumen perencanaan pembangunan daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasaman Barat menyusun Rencana Kerja Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 s/d 2026.

Rencana Kerja (Renja) merupakan Perencanaan Tahunan dari Rencana Strategis yang berjangka waktu lima tahun. Rencana Kerja memberikan gambaran lebih mendetail tentang sasaran serta program dan kegiatan yang ditetapkan sebagai suatu strategi untuk mencapai sasaran tersebut, sehingga dalam dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dengan indikator output dan indikator outcomes yang akan dicapai.

Dalam penyusunan Renja ini, masukan dan saran tentunya sangat diharapkan untuk dapat lebih menyempurnakan Renja Dinas menuju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasaman Barat yang responsive dan aspiratif.

Simpang Empat, September 2022  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PASAMAN BARAT



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan merupakan suatu proses dan upaya untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dari kondisi saat ini. Agar pembangunan mencapai hasil yang diinginkan diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang matang dan terpadu, mencakup semua aspek yang terkait dengan perencanaan itu sendiri. Perencanaan pembangunan daerah peranannya semakin penting dalam memetakan potensi yang ada secara optimal tanpa mengabaikan kelestarian alam dan lingkungan, sehingga strategi yang dirumuskan melalui implementasi sistem perencanaan dapat dilakukan secara komprehensif dan sistematis.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsif sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja mempunyai kedudukan yang strategis dalam menjembatani perencanaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Pasaman Barat Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pasaman Barat Tahun 2021-2026 dan menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 berisi dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam kerangka regulasi dan anggaran untuk periode 1 (satu) tahun kedepan yang bersifat teknis operasional dan kuantitatif bagi pelaksanaan pembangunan daerah di Kab. Pasaman Barat. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun

2020 dan tahun berjalan, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2021.

## **1.2. Dasar Hukum**

- 1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 9) Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 14) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025;
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman

- Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3);
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Organisasi Perangkat Daerah;
  - 18) Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
  - 19) Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 44 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan 1 (satu) tahunan yang memuat program dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta sebagai perangkat untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang terintegrasi pada Tahun 2022.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan selama periode 1 (satu) tahun;
2. Mengoptimalkan fungsi perencanaan Pembangunan Daerah setiap bidang, baik Pelayanan pendaftaran penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, responsif, partisipatif, efektif, efisien, dan berkelanjutan
4. Menyediakan informasi dan gambaran pelaksanaan fungsi serta tolok ukur kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pasaman Barat
5. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat sebagai upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana



Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, memuat ketentuan antara lain:

- 1) Memuat program, kegiatan lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 2) Berpedoman pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja;
- 3) Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun pada rancangan awal Renja adalah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra;
- 4) Program dan Kegiatan dalam RENJA harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD serta disusun selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang;
- 5) Renja disajikan paling sedikit memuat pendahuluan; hasil evaluasi Renja tahun lalu; tujuan dan sasaran; rencana kerja dan pendanaan; dan penutup.
- 6) Dokumen Renja akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD dan menjadi rancangan RKPD Pemerintah Daerah.

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL diuraikan sebagai berikut:

## **BAB 1 : PENDAHULUAN**

- 1.1 *Latar Belakang*, Menguraikan gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pengertian ringkas tentang Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, proses penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, keterkaitan antara Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan Renja K/L dan Renja provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2 *Landasan Hukum*, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang

mengatur tentang SOTK, kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- 1.3 *Maksud dan Tujuan*, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 1.4 *Sistematika Penulisan*, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2020**

- 2.1 *Evaluasi Pelaksanaan Renja* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil *Tahun Lalu dan Capaian Renstra* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun sebelumnya, capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2 *Analisis Kinerja Pelayanan* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
- 2.3 *Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan hal kritis yang terkait; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*); tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.
- 2.4 *Review terhadap Rancangan Awal RKPD*, Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut.
- 2.5 *Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat*, menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan pelaksanaan musrenbang.

## **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1 : *Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi*, memuat penelaahan



yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- 3.2 *Tujuan dan sasaran Renja* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 3.3 *Program dan Kegiatan*, memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

**BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB V : PENUTUP**

Memuat Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja OPD bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja OPD yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD. Melalui evaluasi akan diketahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 4 (Empat) program yang terdiri dari 17 kegiatan. Sementara pada tahun 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 4 (Empat) program yang didukung oleh 11 kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2020 memuat pencapaian target kinerja tahun 2021 berdasarkan rencana kerja sebagaimana telah disusun. Sedangkan, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022 memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun berjalan, yang kemudian dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun sebelumnya serta yang akan datang

Adapun informasi yang akan didapatkan melalui evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Hasil evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2021 serta perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (TA 2022) disajikan pada Tabel T-C. 29 di bawah ini :

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

NO	Sasaran	Program/Kegiatan /sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan II Tahun 2021		Presentase Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2021)		Presentase Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)	
				5	6	7	8	9=8/7x100	10=8/5x100%						
1	2	3	4	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah												
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dan pencatatan sipil	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	150 Buku data agregat, 75 Buku profil perkembangan kependudukan			150 Buku data agregat, 75 Buku profil perkembangan kependudukan	36,375,000								
2	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dan pencatatan sipil	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya survey kepuasan masyarakat oleh pihak ketiga			100%	57,750,000								

[illegible]



7	Meningkatnya kualitas pelayanan adminduk dan pencatatan sipil	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi pemanfaatan data dan pelatihan petugas adminduk, spanduk, baliho, poster				3 macam	435,819,300	1 macam	55,500,000	1	13		
8	Meningkatnya kualitas pelayanan adminduk dan pencatatan sipil	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti				2 orang	112,858,000	2 orang					
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah											
9	Meningkatnya kualitas pelayanan adminduk dan pencatatan sipil	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan penerangan dan instalasi listrik penunjang operasional kantor				1 paket	5,051,232	1 paket					
10	Meningkatnya kualitas pelayanan adminduk dan pencatatan sipil	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya penerbitan dokumen kependudukan				1 tahun	652,800,000	7 bulan	40,800,000	6	6		
11	Meningkatnya kualitas pelayanan adminduk dan pencatatan sipil	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rakor yang diikuti				12 kali	227,668,200	10 kali	87,813,300	40	39		
12	Meningkatnya kualitas pelayanan adminduk dan pencatatan sipil	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya kegiatan secara Virtual				1 tahun	7,200,000	7 bulan	3,325,000	50	46		



[illegible]

17	Meningkatnya kualitas pelayanan adminduk dan pencatatan sipil	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kenaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/kir	100%	76,850,000	60%	21,011,950	27	27		
18	Meningkatnya kualitas pelayanan adminduk dan pencatatan sipil	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat elektronik yang dipelihara	100%	29,770,000	60%					
19	Meningkatnya kualitas pelayanan adminduk dan pencatatan sipil	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung	100%	37,874,000	100%					
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan kepemilikan KTP-elektronik								
20	Meningkatnya kualitas pelayanan adminduk dan pencatatan sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Diterbitkannya KK, KTP, KIA	KTP 100%, KIA 50%	82,150,000	KTP 100%, KIA 50%	31,550,000	38	38		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Cakupan kepemilikan KTP-elektronik								
21	Meningkatnya kualitas pelayanan adminduk dan pencatatan sipil	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya pemanfaatan data kependudukan dengan semua opd	11 Kecamatan	66,300,000	11 Kecamatan	30,600,000	46	46		





Tabel T.C 30

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Kabupaten Pasaman Barat**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke				Realisasi Capaian Tahun ke		Proyeksi	
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	7	8	9		11	12	18	19
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD		Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	B	B	B	B	CC	B	B	B
			Opini terhadap laporan keuangan OPD		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Level Maturitas SPIP	-	3	3	3	3	3	3	3	3
2	Program Penataan administrasi Kependudukan		1. Cakupan Kepemilikan KTP-Elektronik	76%	84%	88%	92%	95%	93%	94,12%	95%	100%
			2. Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran 0 s.d 18 Th	40%	60%	75%	80%	90%	93,78%	95,88%	95,5%	100%
3	Program Informasi Administrasi Kependudukan		Rata - rata lama waktupelayanan kependudukan	14 HARI	3 HARI	3 HARI	2 HARI	1 HARI	1 HARI	1 Jam	1 Jam	1 Jam

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kabupaten Pasaman Barat dihadapkan pada sejumlah isu-isu penting yang berimplikasi terhadap penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah. Adapun isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian adalah :

1. Pencapaian target rekam/cetak ktp-el 100%
2. Memaksimalkan layanan online demi memberi kemudahan kepada masyarakat.
3. Pemutakhiran Data berkelanjutan menuju satu data kependudukan.
4. Pencapaian target kepemilikan KIA 30%
5. Pemanfaatan data kependudukan oleh semua OPD

### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kab. Pasaman Barat membutuhkan pagu anggaran sebesar **Rp. 4,018,889,071** ( *Empat Milyar delapan belas juta delapan Ratus delapan pulu Sembilan ribu tujuh puluh satu* target kinerja pada tahun 2022. Pagu dana tersebut diproyeksikan untuk mendukung pelaksanaan-kegiatan dari 4 program (teknis dan rutin) yang direncanakan :

Adapun telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2021 dapat disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel T-C. 31**  
Review Terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2021

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis kebutuhan					Catt
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian (%)	Pagu Indikatif (Rp.000)	Pen
1.	<b>Penataan Administrasi Kependudukan</b>	Capil	Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran 0 s.d 18 Th	75%	1.694.753	<b>Penataan Administrasi Kependudukan</b>	Capil	Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran 0 s.d 18 Th	93,78%	2.007.711	
			Cakupan Kepemilikan KTP-Elektronik	88%			Capil	Cakupan Kepemilikan KTP-Elektronik	93%		
	Peningkatan pelayanan akte kelahiran	Capil	Jumlah akte Kelahiran yang diterbitkan	75%	103.240	Peningkatan pelayanan akte kelahiran	Capil	Jumlah akte Kelahiran yang diterbitkan	23.300 Akte Kelahiran	133.386	



	Pelaksanaan Penerapan e-KTP	Capil	Jumlah KTP-el yang diterbitkan	88%	173.166	Pelaksanaan Penerapan e-KTP	capil	Jumlah KTP-el yang diterbitkan	17.201 Keping	212.112		
2.	Program Informasi Administrasi Kependudukan	capil	Persentase Pemerintah Data Administrasi Kependudukan	11 Kec	253.230	Persentase Pemerintah Pemanfaatan Data Administrasi Kependudukan	capil	11 Kec	97.652			
	Implementasi sistem Administrasi Kependudukan	capil	Terpeliharanya akurasi data kependudukan melalui jaringan dan aplikasi SIAK	11 Kec	70.082	Implementasi sistem Administrasi Kependudukan	capil	Terpeliharanya akurasi data kependudukan melalui jaringan dan aplikasi SIAK	11Kec	97.652		

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dari Masyarakat**

Mengingat tugas pokok dan fungsi DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kabupaten Pasaman Barat dalam mengkoordinasikan dan mensinergikan program-program pembangunan yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Pasaman Barat tidak memiliki usulan program dari masyarakat.

### BAB III

#### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

Didalam undang- undang no. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang – undang no. 24 Tahun 2013 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diantaranya bertujuan untuk menyediakan data dan informasi Kependudukan secara rasional yang akurat, lengkap, mutakhir sehingga menjadi acuan untuk perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya

#### 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Berdasarkan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, maka tujuan yang ingin dicapai dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 adalah seperti tertuang pada tabel berikut:

**Tabel TC.25.**

#### TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Penerapan tatakelola pemerintahan profesional, akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	3	3	3	3	3
			Opini BPK atas laporan keuangan daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Nilai SAKIP	B	B	B	B	B

	dan inovatif		Level Maturitas SPIP	3	3	3	3	3
			Nilai WBK-WBBM	-	-	-	-	-
		Meningkatkan kualitas pelayanan Adminduk dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat	Biru	Biru	Biru	Biru	Biru

### 3.2. Rencana Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, selain menjalankan program rutin, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat selaku koordinator dalam perencanaan pembangunan daerah bertanggung jawab mengkoordinasikan keselarasan program-program pembangunan daerah di seluruh OPD yang berada di bawah lingkup koordinasinya. Secara umum, rencana program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pasaman Barat Tahun 2022 tertuang dalam 4 (empat) program yang akan didukung oleh 11 (Sebelas) kegiatan, seperti terlihat pada tabel berikut:

## Tahun 2022

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif Sumber Dana (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Lokasi Output Kegiatan	Program					KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan
2													
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	12								5,215,030,039		8,777,088,978		
2	12	01							4,082,144,639		6,410,588,978		
2	12	01	2.01						0		51,012,500		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
2	12	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0		40,012,500		
2	12	01	2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Laporan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	11,000,000		
2	12	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,876,041,709		3,631,297,817
2	12	01	2.02	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah PNS yang menerima gaji dan tunjangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	24 Orang	100%	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3,037,159,817		



2	12	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah Non PNS(PTT/THL) penunjang administrasi perkantoran	Presentasi Realisasi Keuangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	38 Orang	100%	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	235,844,350			500,000,000
2	12	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Vertifikasi Keuangan SKPD	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	Presentasi Realisasi Keuangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	7 Orang	100%	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	97,647,000			94,138,000
2	12	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									9,435,000			17,160,000
2	12	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah ASN penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola BPBD	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 Orang	624 Unit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9,435,000			17,160,000
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									97,128,000			541,796,915
2	12	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah spanduk yang dicetak	Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3 Buah	100%	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	58,550,000			439,605,540
2	12	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek diklat	Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 Orang	100%	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	38,578,000			102,191,375
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									101,659,370			1,010,786,680
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah penyediaan alat listrik dan elektronik	Persentase penyediaan alat listrik dan elektronik	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Paket	1 Paket	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5,607,370			5,556,355
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah Sapras Dokumen Kependudukan	Persentase terpenuhinya sapras dokumen kependudukan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Paket	100%	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0			668,580,000



2	12	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Presentase Penyediaan Peralatan Rumah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Paket	1 Paket	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1,100,000
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah Pemenuhan barang cetak dan penggandaan	Pemenuhan barang cetak dan penggandaan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Paket	1 Paket	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	11,000,000
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Presentase Rapat Koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	24 kali	24 kali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	316,630,325
2	12	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah jaringan SIAK dalam pelayanan PIAK	Presentase OPD dan kecamatan yang melaksanakan AK	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Disdukcapil dan 11 kecamatan	100%	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7,920,000
2	12	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>									203,500,066
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Presentase pengadaan barang milik daerah penunjang uisan kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Unit	100%	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	192,500,066
2	12	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah pengadaan gedung kantor	Presentase pengadaan barang milik daerah penunjang uisan kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Unit	100%	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	11,000,000
2	12	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									823,000,000
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah ATK yang dibutuhkan	Presentase pemenuhan kebutuhan ATK	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 paket	100%	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	220,000,000

2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan sumber daya air, listrik, dan internet untuk operasional kantor	Cakupan pemenuhan penyediaan Jasa layanan penunjang urusan kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	100%	120,001,310	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			130,000,000	
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah pelayanan secara aktif - jumlah cetak tanderima	Cakupan pemenuhan penyediaan Jasa layanan penunjang urusan kantor, Presentse Pelayanan keliling	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	100%	130,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			473,000,000	
2	12	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												128,024,000		132,035,000
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayara pajak KIR	Presentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	21 unit	100%	78,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			84,535,000	
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	Presentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	48 unit	100%	29,860,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20,000,000	
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang terpelihara	Presentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Unit	100%	19,964,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			27,500,000	
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK												636,415,400		1,600,000,000	
2	12	02	2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk												636,415,400		1,600,000,000
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	-Jumlah ribbon film yang dibeli -Jumlah ribbon colour -Cleaning kit -Blanko KIA yang dibeli -Blanko dan folmulir dan buku pendaftaran penduduk yang dibeli	Presentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	KTP 100% KIA 50%	-Ribbon fargo 30.000x8.700 -Ribbon evolis 20.000x5.000 -Blanko KIA 20.000 keping x 5.000	100%	636,415,400				1,600,000,000	
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL												202,035,000		264,000,000	

2	12	03	2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil					202.035,000	264,000,000		
				Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah akte kelahiran yang diterbitkan	Presentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A. kelahiran 96% A. kematian 100% A. perkawinan 100%	100%	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	264,000,000
2	12	03	2.01	01		Jumlah akte kelahiran yang diterbitkan	Jumlah akte kematian yang diterbitkan					264,000,000
2	12	04	2.01	01		Jumlah Akte Perkawinan yang diterbitkan						
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN							
2	12	04			Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan							
2	12	04	2.01									502,500,000
2	12	04	2.01									500,000,000
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah informasi administrasi adminduk yang dikelola	Jumlah informasi administrasi adminduk yang dikelola	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	500,000,000
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							
2	12	04	2.03									2,500,000
2	12	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah hak akses pemanfaatan data ware house kependudukan	Jumlah hak akses pemanfaatan data ware house kependudukan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2,500,000
TOTAL										5,215,030,039	8,777,088,978	



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun 2023. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja akan sangat bergantung kepada komitmen dan kerjasama semua pihak yang terkait. Diperlukan sinergitas antar semua pihak dalam pencapaian tujuan, program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Penyusunan Renja sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan perumusan rencana program untuk pembangunan 1 tahun kedepan. Selain sebagai kontrol terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan OPD pada akhir tahun anggaran.

**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat**

**Tahun 2022**

Unit Organisasi : DisdukCapil

Kode				Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Sumber Dana	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Induktif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
5				Usuran Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
5	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah			100%			4,082,144,639			
5	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									2,876,041,709	
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah PNS yang menerima gaji dan tunjangan	Persentase realisasi keuangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	24 Orang	100%	2,542,550,359	DAU
5	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah Non PNS(PTT/THL) penunjang administrasi perkantoran	Persentase realisasi keuangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	38 Orang	100%	235,844,350	DAU

5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	Persentase realisasi keuangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	7 Orang	100%	97,647,000	DAU
5	01	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>									
5	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah ASN penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola BPBD	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 Orang	624 Unit	9,435,000	DAU
2	12	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>									
5	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah spanduk yang dicetak	Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3 buah	100%	58,550,000	DAU
5	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/diklat	Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 Orang	100%	38,578,000	DAU
5	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>									
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah penyediaan alat listrik dan elektronik	Persentase penyediaan alat listrik dan elektronik	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Paket	1 Paket	5,607,370	DAU



1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	Persentase penyediaan peralatan rumah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Paket	1 Paket	0	DAU
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah pemenuhan barang cetak dan penggandaan	Pemenuhan barang cetak dan penggandaan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Paket	1 Paket	0	DAU
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Persentase pelayanan akses DWH dan PKS, Persentase pelaksanaan terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi OPD	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Kali	100%	96,052,000	DAU
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									490,665,000
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Unit	100%	490,665,000	DAU

5	01	01	2.07	09	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah pengadaan gedung kantor	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Unit	100%	0	DAU
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							379,191,560		
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Air, listrik, dan internet untuk operasional Kantor	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Bulan	100%	120,001,310	DAU
5	01	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah Pelayanan secara aktif, jumlah Cetak Tanda terima,	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor , Persentase penyediaan pelayanan kelling	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Bulan	100%	130,000,000	DAU
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah Sapras Dokumen Kependudukan	Persentase terpenuhinya sapras dokumen kependudukan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Paket	100%	0	DAU

5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah ATK yang di butuhkan	Persentase pemenuhan kebutuhan ATK	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 paket	100%	129,190,250	DAU
5	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atay Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	21 Unit	100%	78,200,000	DAU
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	48 Unit	100%	29,860,000	DAU
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang terpelihara	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Unit	100%	19,964,000	DAU
2	12	02			PROGRAM Pendaftaran Penduduk	Rasio kepemilikan dokumen kependudukan			95%					636,415,400
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran penduduk									636,415,400



2	12	02	2.01	02	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	1. Jumlah ribbon film yang di beli 2. Jumlah ribbon colour 3. Cleaning Kit 4. Balnko KIA yang dibeli 5. Blanko dan formulir dan buku pendaftaran penduduk yang di beli	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	KTP 100%, KIA 50%	Ribbon fargo 30.000x8.700, Ribbon Evolis, 20.000 x 5.000, Blanko KIA 20.000 kepingx5.000	100%	636,415,400	DAU
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio kepemilikan dokumen kependudukan					90%	202,035,000		
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil								202,035,000	
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	1. Jumlah Akte kelahiran yang diterbitkan 2. Jumlah Akte kematian yang diterbitkan 3. Jumlah Akte Perkawinan yang diterbitkan	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A. Kelahiran an 96%, A. Kematia n 100%, A. Perkawin an 100%		100%	202,035,000	DAU

[illegible]



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 ini merupakan kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Pasaman Barat 2021-2026. Pada dasarnya Rencana Kerja perubahan Tahun 2022 mengurai target kinerja yang hendak dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2022 mencakup 11 kegiatan dalam 4 program untuk mencapai 2 sasaran dan 1 tujuan. Namun demikian kegiatan yang ada telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta dinamika yang berkembang dalam masyarakat, dan juga menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Dengan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 ini diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung tercapainya masyarakat Pasaman Barat yang sejahtera, demokratis dan agamais.

Simpang Empat, 6 Agustus 2021

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN**

**PASAMAN BARAT**



**Hj. YULISNA, SH**